

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN KAMPUNG MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG HABEMA DISTRIK IBELE KABUPATEN JAYAWIJAYA

Perince Meaga^{1*}, Muhammad Ali², Irna³

^{1,2,3} Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Papua Pegunungan

*Korespondensi: perincemeaga@gmail.com
<https://doi.org/10.61578/jls.5.2.47-55>



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung Habema Distrik Ibele Kabupaten Jayawijaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan 10 informan yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber dan waktu. Analisis dilakukan berdasarkan lima indikator komunikasi interpersonal menurut DeVito, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintahan kampung secara umum telah berjalan cukup baik dalam mendukung pembangunan. Keterbukaan telah dilakukan melalui musyawarah dan penyampaian informasi pembangunan, namun transparansi administrasi masih terbatas. Empati pemerintah terlihat melalui kedekatan sosial dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun belum terstruktur secara formal. Sikap mendukung dan sikap positif tercermin dari fasilitasi berbagai kegiatan masyarakat serta komunikasi yang ramah dan mendorong partisipasi. Sementara itu, prinsip kesetaraan telah diterapkan melalui forum musyawarah kampung, namun keterlibatan perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas komunikasi pemerintahan perlu diperkuat melalui peningkatan partisipasi, transparansi, dan inklusivitas pembangunan.

Kata Kunci: Komunikasi Pemerintahan, Pembangunan Kampung, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Kampung Habema.

ABSTRACT

This study aims to analyze government communication in the implementation of development programs in Habema Village, Ibele District, Jayawijaya Regency. The research employed a descriptive qualitative approach involving 10 informants selected through purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using source and time triangulation techniques. The analysis was based on DeVito's five interpersonal communication indicators: openness, empathy, supportiveness, positiveness, and equality. The findings reveal that village government

communication has generally functioned well in supporting development activities. Openness has been implemented through village meetings and dissemination of development information, although administrative transparency remains limited. Empathy is reflected in the government's attention to community needs and close social interactions, despite the absence of formal mechanisms. Supportiveness and positive attitudes are demonstrated through facilitation of community initiatives and encouraging communication practices. Equality has been promoted through participatory village forums; however, the involvement of women and youth in decision making remains limited. The study concludes that the effectiveness of government communication can be enhanced through greater participation, transparency, and inclusiveness to support sustainable village development.

Keywords: *Government Communication, Village Development, Community Participation, Transparency, Habema Village.*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, peran komunikasi disarankan sangat penting terutama dalam pembangunan. Penggunaan komunikasi di sesuaikan dengan fungsi serta tujuan yang diinginkan. Tujuan komunikasi tersebut mencakup penyelesaian tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan hidup serta menciptakan dan memupuk hubungan kerja antara Pemerintahan dan Kepala Kampung demi meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat kampung (Ulfiyah et al., 2023). Adapun fungsi yang berkaitan dengan tujuan tersebut sebagai fungsi isi yang melibatkan pertukaran informasi yang diperlukan dan fungsi hubungan yang melibatkan informasi mengenai suatu hubungan dengan orang lain (Haris & Amalia, 2024).

Melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dengan memberikan masyarakat manfaat positif akan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara terminologi, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian suatu pernyataan (pesan) oleh sumber kepada penerima baik secara verbal maupun non verbal yang menimbulkan makna tertentu yang dapat dipahami baik sumber maupun penerima (feedback) melalui saluran tertentu. Kualitas suatu pemerintahan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat (Nurnoviyati, 2025)

Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. (Soeltanto et al., 2025). Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Semua organisasi tidak peduli bagaimana bentuk dan tujuannya, ditopang, disatukan, dan melaksanakan fungsinya melalui proses komunikasi. (Izzanti et al., 2025). Komunikasi adalah saluran untuk melakukan dan menerima pengaruh, mekanisme perubahan, alat untuk mendorong dan mempertinggi motivasi serta prana dan sarana yang memungkinkan. Komunikasi sebagai proses saling membagi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi. (Suseno, 2023). Selain itu, efektivitas komunikasi pemerintah berperan vital dalam membangun kepercayaan publik, yang pada gilirannya menjadi fondasi krusial bagi keberhasilan setiap regulasi dan kebijakan pembangunan demi mencapai kesejahteraan bersama (Nasfi & Ariani, 2020).

Komunikasi yang efektif juga dibangun dengan dasar keterbukaan yang menjadi kunci dasar bagi kepercayaan dan kesenangan. Komponen dari proses komunikasi meliputi pengirim pesan (sender), penerima pesan (receiver), pesan (message), serta variabel pesan

(message variables) yang meliputi verbal dan non verbal, bunyi (noise), keterampilan komunikasi (communication skill), penempatan (setting), media umpan balik (feed back), dan lingkungan (environment) (Nurrachmah, 2024). Integrasi dari seluruh elemen ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan persamaan persepsi antara komunikator dan komunikan sebagai indikator tercapainya efektivitas komunikasi (Juanda et al., 2020).

Menurut (DeVito, 2013), komunikasi interpersonal dapat sangat efektif dan dapat pula sangat tidak efektif. Karakteristik efektifitas ini dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu pendekatan humanistik, pendekatan pragmatis, dan pendekatan sosial. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan humanistik dikarenakan pendekatan ini paling cocok dibandingkan pendekatan lain. Pendekatan humanistik menekankan pada keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan kualitas-kualitas lain yang menciptakan interaksi yang bermakna, jujur, dan memuaskan pendekatan ini dimulai dengan kualitas-kualitas umum yang menentukan terciptanya hubungan antar manusia yang superior. Menurut (DeVito, 2013) dalam pendekatan humanistik ada lima sikap positif yang harus dipersiapkan dalam komunikasi yaitu: Keterbukaan (Openness), Empati (Empathy), Sikap mendukung (Supportiveness), Sikap positif (Positiveness) dan Kesetaraan (Equality).

Proses komunikasi terjadi jika komponen-komponen dari proses komunikasi tersebut bekerja sesuai dengan fungsinya, seseorang sebagai pengirim pesan atau encoder memiliki inisiatif untuk menyampaikan pesan kepada orang lain yang disampaikan baik secara verbal maupun nonverbal. (Anas & Sapri, 2022). Pengirim pesan akan menyampaikan stimulus berupa ide ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh penerima pesan atau decoder secara tepat. Dalam proses penyampaian pesan dari encoder kepada decoder dapat melalui media yang disebut juga channel sensory meliputi 7 indra pendengaran, penglihatan, peraba, perasa dan penciuman, sebagai cara untuk menerapkan komunikasi interpersonal secara verbal maupun nonverbal. (Sartika et al., 2023). Bidan pun harus memiliki keterampilan dan skill komunikasi yang baik agar tujuan dari proses komunikasi tercapai, seperti halnya kemampuan bidan mengobservasi, mendengar, mengklarifikasi dan memvalidasi arti pesan yang disampaikan serta feedback dari penerima pesan. Proses komunikasi tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan bidan berkomunikasi dan keadaan klien, tetapi juga terdapat faktor lingkungan yang mempengaruhi proses komunikasi (Sukmawati, 2020). Komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan, dan mencakup lima prinsip komunikasi efektif yakni menghargai orang lain, empati, dapat dimengerti, kejelasan, rendah hati yang mampu menghasilkan perubahan sikap (attitude change) pada orang yang terlibat komunikasi.

Pembangunan dalam masyarakat mencakup pengertian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Yang pada dasarnya berhasil jika masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Di tengah masyarakat yang beraneka ragam suku dan budaya, tentunya mempunyai nilai seperti : nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, kejujuran dan yang khas pada masyarakat kita, sehingga dengan adanya nilai-nilai tersebut masyarakat mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. (Tanjung et al., 2025). Pembangunan dalam masyarakat haruslah diterapkan sistem dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga masyarakat menyadari betapa pentingnya suatu pembangunan yang ada di daerahnya. Birokrasi dalam hal ini pemerintah harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan pembangunan pada daerah masing-masing dan di sini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan iklim yang menunjang setiap pembangunan (Syakura et al., 2025).

Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan sosial yang dirancang untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, sesuai dengan tujuan yang

sudah ditetapkan pembangunan tidak sekedar pembangunan fisik tetapi juga mencakup perubahan (Safira et al., 2022). Masalah pembangunan tidak saja menjadi perhatian bagi masyarakat kampung namun terhadap Pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan haruslah mempunyai kredibilitas, daya tarik, kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan dan perasaan agar masyarakat dapat dipengaruhi untuk mengikuti keinginan dari pemerintah sehingga pembangunan dapat dilaksanakan. Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, tugas pemerintahan termasuk di dalamnya pemeliharaan hubungan (Zahra, 2023).

Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antara manusia (human communication) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. karena itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi dan juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifatnya berhubungan dan saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal. Pesan yang disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide (sharing ideas), intruksi (intruction), atau perasaan-perasaan (feelings) berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah (Mustika et al., 2025).

Namun demikian komunikasi pemerintahan kampung dalam melaksanakan pembangunan di Kampung Habema Distrik Ibele Kabupaten Jayawijaya ternyata mempunyai kendala, dan sesuai dengan analisis awal di lapangan, adapun kendala-kendala tersebut yaitu Kepala Kampung sebagai komunikator kurang dipercaya dalam hal etika menyampaikan tentang proyek pembangunan seringkali pelaksanaannya berbeda jauh dengan apa yang disampaikan, minimnya keterbukaan dan intensitas informasi tentang proyek-proyek pembangunan yang masuk dalam desa dalam arti ketika sementara melaksanakan proyek pembangunan, menurut hasil penelitian, ternyata tidak ada transparansi dalam segala hal tentang proyek yang sementara dijalankan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai pendekatannya, berdasarkan jenis data yang digunakan. Jika ditinjau dari sarana-sarana yang digunakan, Tujuan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskripsi adalah untuk mengetahui komunikasi pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan Kampung. Informan penelitian ini adalah 10 orang. Teknik menentukan informan yang diwawancarai untuk memperoleh data-data kualitatif ditentukan dengan tujuan dan sasaran tertentu dalam pikiran secara purposive. Subjek yang dipilih adalah mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga dapat memberikan data yang lebih mendalam dan sesuai dengan kebutuhan penelitian (Rante et al., 2025). Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data bergantung pada kapasitas untuk menghubungkan data, fakta, dan informasi yang telah dikumpulkan sendiri oleh peneliti karena tidak bergantung pada interpretasi data pada penghitungan seperti halnya dalam penelitian kualitatif (Mulyani et al., 2024). Untuk keperluan derajat kepercayaan digunakan *triangulasi*. Triangulasi penelitian meliputi waktu dan sumber data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, pemerintah kampung memiliki posisi strategis dalam menghubungkan kebijakan publik dengan kebutuhan riil warga di tingkat akar rumput. Proses pembangunan di kampung tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas komunikasi antara aparat kampung dan masyarakat.

Di Kampung Habema Distrik Ibele, dinamika komunikasi pemerintahan mencerminkan hubungan antara nilai-nilai budaya lokal, sistem pemerintahan formal, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pola komunikasi yang digunakan aparat kampung berperan penting dalam menentukan sejauh mana masyarakat memahami tujuan pembangunan, merasa dilibatkan dalam prosesnya, dan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam konteks ini, komunikasi pemerintahan tidak sekadar menjadi alat penyampaian informasi, melainkan juga sarana membangun kepercayaan, rasa memiliki, dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warga.

Untuk memahami sejauh mana komunikasi pemerintahan kampung berjalan di Kampung Habema, penelitian ini menggunakan lima indikator komunikasi yang dikemukakan oleh DeVito (2013), yaitu keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positive attitude*), dan kesetaraan (*equality*). Kelima indikator ini digunakan untuk menilai bagaimana aparat kampung membangun hubungan komunikatif dengan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

a. Keterbukaan (Openness)

Keterbukaan merupakan pondasi utama dalam menciptakan komunikasi pemerintahan yang sehat dan efektif. Dalam konteks pembangunan kampung, keterbukaan tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat untuk memastikan setiap keputusan dan langkah pembangunan dapat diketahui, dipahami, dan dikritisi oleh warga. Prinsip ini menjadi sangat penting di tengah masyarakat majemuk seperti Kampung Habema Distrik Ibele, yang terdiri dari berbagai suku dan nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi kejujuran serta musyawarah.

Namun kenyataannya, masalah yang sering muncul adalah rendahnya transparansi dalam penyampaian informasi pembangunan. Sebagian warga merasa belum sepenuhnya mengetahui arah penggunaan dana kampung, sementara pelaksanaan proyek kerap berbeda dari penjelasan awal pemerintah. Minimnya dokumentasi, keterbatasan akses terhadap dokumen resmi, serta pola komunikasi yang masih bersifat lisan menimbulkan kesenjangan informasi antara aparat dan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan DM selaku Kepala Kampung Habema Distrik Ibele Kabupaten Jajay mengemukakan bahwa:

"....saya sudah berupaya menyampaikan informasi pembangunan melalui musyawarah kampung yang rutin diadakan setiap awal tahun, setiap rencana kegiatan dan penggunaan dana pembangunan saya dibacakan secara terbuka di hadapan warga, namun memang dokumen tertulis seperti RAB dan laporan keuangan belum sepenuhnya diakses bebas oleh masyarakat karena keterbatasan media penyebaran informasi dan rendahnya literasi administrasi warga.." (21 Oktober 2025 , 10.20 WIT)

Ditambahkan juga oleh SK selaku Sekretaris Kampung Habema Distrik Ibele Kabupaten Jajay mengemukakan bahwa:

"...saya rasa beberapa informasi sudah disampaikan melalui papan pengumuman di kantor kampung, namun tidak semua warga rutin memeriksanya.." (21 Oktober 2025 , 13.00 WIT)

Namun berbeda dengan yang dikemukakan oleh Tokoh Agama Kampung Habema Distrik Ibele Kabupaten Jajay bahwa :

“...sebenarnya kita sebagai masyarakat kadang masih merasa sulit memahami istilah teknis dalam dokumen proyek sehingga membutuhkan penjelasan langsung dari aparat...” (22 Oktober 2025 , 09.30 WIT) :

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan dalam komunikasi pemerintahan Kampung Habema telah dijalankan, namun belum sepenuhnya efektif. Kepala Kampung dan aparat telah berupaya memberikan informasi pembangunan melalui musyawarah dan pengumuman resmi, tetapi praktik keterbukaan tersebut masih terbatas pada penyampaian lisan dan belum diimbangi dengan dokumentasi tertulis yang mudah diakses oleh masyarakat. Keterbatasan fasilitas informasi, rendahnya literasi administrasi masyarakat, serta kurangnya media komunikasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat menyebabkan transparansi belum berjalan optimal. Masyarakat mengakui adanya upaya pemerintah untuk bersikap terbuka, tetapi masih merasakan kesenjangan informasi, terutama terkait rincian penggunaan dana dan pelaksanaan proyek. Dengan demikian, keterbukaan pemerintah Kampung Habema dapat dikategorikan sebagai parsial terbuka dalam niat dan forum musyawarah, namun belum sepenuhnya transparan secara administratif. Diperlukan sistem komunikasi yang lebih sistematis dan inklusif, agar setiap warga tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi proses pembangunan di kampungnya.

b. Empati (*Empathy*)

Empati merupakan salah satu indikator penting dalam komunikasi interpersonal yang efektif, karena melalui empati, komunikasi menjadi dua arah, tidak hanya memberi pesan, tetapi juga menyerap makna dan perasaan dari lawan bicara. Dalam pemerintahan kampung, empati berperan penting untuk membangun kepercayaan sosial (*social trust*) antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan iklim komunikasi yang harmonis dan partisipatif.

Namun demikian, empati yang terbangun masih bersifat spontan dan belum terstruktur. Belum ada mekanisme formal seperti forum evaluasi masyarakat atau survei sosial yang dapat menjadi wadah sistematis untuk menyerap aspirasi warga. Dengan demikian, empati pemerintah kampung sudah berjalan secara kultural, tetapi perlu diperkuat melalui sistem komunikasi partisipatif yang lebih terencana agar keputusan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan DM selaku Kepala Kampung Habema Distrik Ibele Kabupaten Jawajaya mengemukakan bahwa:

“...empati kita disini itu sudah berjalan misalnya biasanya kita disini itu sebelum menyusun rencana kerja, kita melakukan kunjungan untuk mendengar kebutuhan masyarakat, terutama terkait infrastruktur dan bantuan ekonomi” (21 Oktober 2025 , 10.20 WIT)

SK selaku Sekretaris Kampung Habema Distrik Ibele menambahkan bahwa :

“...kita sering melakukan pertemuan informal pada acara keagamaan atau kegiatan adat, yang sekaligus menjadi sarana mendengar aspirasi masyarakat, jadi saya rasa nilai empati kita sudah berjalan dengan baik..” (21 Oktober 2025 , 13.00 WIT)

Dilakukan juga wawancara dengan PY Selaku Kaur Pemerintahan Kampung Habema Distrik Ibele yang mengemukakan bahwa :

“...sebenarnya bentuk empati pemerintah itu sudah terlihat dari penyesuaian kegiatan pembangunan dengan kondisi sosial masyarakat. Misalnya, ketika ada warga

lanjut usia, ibu hamil, atau masyarakat yang sedang berduka, pemerintah memberikan keringanan atau bantuan tambahan. (21 Oktober 2025 , 11.30 WIT)

Wawancara dengan AW selaku Tokoh perempuan Kampung Habema Distrik Ibele juga mengakui bahwa:

‘...saya rasa empati untuk perhatian terhadap kelompok perempuan di kampung memang sudah mulai meningkat, meskipun belum ada forum khusus untuk membahas kebutuhan perempuan secara terpisah.’ (23 Oktober 2025 , 10.00 WIT)

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh PK selaku Tokoh Agama Kampung Habema Distrik Ibele bahwa :

“...biasanya disini itu empati aparat terlihat ketika mereka turun langsung ke lapangan membantu warga yang tertimpa bencana atau kekurangan bahan pangan..” (22 Oktober 2025 , 09.30 WIT)

Dilanjutkan wawancara bersama RS selaku Kepala Suku Kampung Habema Distrik Ibele yang mengemukakan bahwa :

“...perihal empati saya rasa disini hubungan antara aparat dan warga masih cukup dekat karena nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang kuat dalam budaya lokal..” (23 Oktober 2025 , 15.00 WIT)

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan di Kampung Habema, dapat disimpulkan bahwa empati pemerintah kampung dalam melaksanakan pembangunan telah berjalan cukup baik, meskipun masih bersifat spontan dan belum terstruktur secara formal. Dimana secara keseluruhan, empati pemerintah Kampung Habema sudah terinternalisasi dalam praktik sosial dan budaya masyarakat, namun masih perlu diformalisasi melalui mekanisme komunikasi yang lebih sistematis, seperti forum evaluasi rutin atau musyawarah khusus kelompok rentan, agar empati tersebut tidak hanya bersifat situasional, tetapi juga menjadi bagian permanen dari tata kelola pemerintahan kampung yang partisipatif dan berkeadilan.

c. Sikap Mendukung (*Supportiveness*)

Sikap mendukung mencerminkan sejauh mana pemerintah kampung memberikan dorongan, fasilitas, dan ruang bagi masyarakat untuk berinisiatif dalam pembangunan. Dukungan ini penting agar masyarakat merasa diakui dan didorong untuk berkontribusi aktif. Pemerintah yang mendukung tidak hanya menyediakan bantuan material, tetapi juga membangun rasa percaya diri warga untuk menjadi bagian dari solusi pembangunan.

Berikut hasil wawancara dengan DM selaku Kepala Kampung Habema Distrik Ibele Kabupaten Jayajaya mengemukakan bahwa :

“...untuk sikap mendukung kita biasa selalu membuka ruang bagi warga yang ingin mengusulkan kegiatan pembangunan. Contohnya, usulan kelompok pemuda untuk membangun lapangan voli disetujui dan difasilitasi melalui bantuan material dari dana kampung..” (21 Oktober 2025 , 10.20 WIT)

Ditambahkan oleh YA Kaur Pembangunan Kampung Habema Distrik Ibele yang mengemukakan bahwa :

“...sikap mendukung dari pemerintah sudah sering terlihat seperti mengadakan pelatihan pertanian sederhana serta membagikan bibit sayur kepada masyarakat untuk mendorong ketahanan pangan keluarga. Namun memang kegiatan seperti ini belum dilakukan secara berkala...” (22 Oktober 2025 , 16.00 WIT)

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh RS selaku Kepala Suku Kampung Habema Distrik Ibele bahwa :

“...saya menilai untuk dukungan pemerintah sudah baik dalam hal moral dan koordinasi, tetapi masih lemah dalam pembinaan lanjutan setelah kegiatan selesai. (23 Oktober 2025 , 15.00 WIT)

Ditambahkan oleh AW selaku Tokoh Perempuan Kampung Habema Distrik Ibele yang mengemukakan bahwa :

“...bentuk dukungan terhadap perempuan disini saya rasa masih terbatas. Sebagian besar kegiatan yang melibatkan perempuan bersifat domestik seperti memasak saat kegiatan kampung, bukan pelatihan keterampilan ekonomi...” (23 Oktober 2025 , 10.00 WIT)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Kampung Habema Distrik Ibele, dapat disimpulkan bahwa sikap mendukung pemerintah kampung terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah terlihat cukup baik, namun masih perlu diperkuat dalam aspek kesinambungan dan pemerataan dukungan antar kelompok masyarakat. Namun masih perlu ditingkatkan dalam frekuensi, keberlanjutan, serta pemerataan dukungan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan. Pemerintah kampung perlu mengembangkan program pembinaan berkelanjutan agar dukungan yang diberikan benar-benar mampu memberdayakan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

4. Sikap Positif (*Positive Attitude*)

Sikap positif dalam komunikasi pemerintahan mengacu pada upaya aparat kampung untuk menumbuhkan semangat, optimisme, dan rasa kebersamaan warga dalam proses pembangunan. Sikap ini tampak dari cara pemerintah menyampaikan pesan apakah bersifat membangun, memotivasi, dan menghargai, atau sebaliknya kaku dan instruktif. Pemerintahan yang komunikatif dan positif akan menciptakan suasana kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Namun, salah satu kendala utama di lapangan adalah cara penyampaian pesan yang terkadang masih bersifat satu arah. Pemerintah kampung lebih banyak memberi instruksi daripada membangun komunikasi dua arah yang mendorong antusiasme masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa hanya menjadi pelaksana, bukan bagian dari perencana atau pengambil keputusan. Di sisi lain, sikap positif yang ditunjukkan melalui perayaan kecil, doa bersama, atau poster motivatif sebenarnya sudah menjadi modal sosial penting yang perlu diperkuat. Dengan menjaga konsistensi sikap positif dalam setiap proses komunikasi, pemerintah kampung dapat membangun rasa percaya dan kebanggaan bersama terhadap hasil pembangunan yang dicapai.

Berikut hasil wawancara dengan DM selaku Kepala Kampung Habema Distrik Ibele Kabupaten Jayapura mengemukakan bahwa :

“...menurut saya sikap positif aparat Kampung Habema Distrik Ibele itu terlihat dalam bahasa yang digunakan dalam setiap pertemuan dengan masyarakat. Dimana saya selalu menekankan pentingnya semangat kerja sama dan gotong royong untuk memajukan kampung...” (21 Oktober 2025 , 10.20 WIT)

Ditambahkan oleh SK selaku Sekretaris Kampung Habema Distrik Ibele yang mengemukakan bahwa :

“...saya rasa sikap yang kita tunjukkan dengan nada komunikasi yang digunakan cenderung ramah dan mendorong partisipasi masyarakat...” (23 Oktober 2025 , 13.00 WIT)

Dilakukan wawancara juga dengan AP selaku Tokoh Pemuda Kampung Habema

Distrik Ibele yang menyebutkan bahwa :

‘...biasanya setelah proyek pembangunan di kampung selesai, pemerintah kampung biasanya mengadakan acara bersama warga sebagai bentuk apresiasi atas kerja kolektif, yang saya rasa itu sudah menunjukkan sikap positif..’ (24 Oktober 2025 , 10.50 WIT)

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh EM selaku Tokoh Pemuda Kampung Habema Distrik Ibele bahwa :

“....untuk sikap positif saya menilai pemerintah kampung yang biasanya komunikasi langsung antara aparat dan warga lebih efektif karena dapat membangun kedekatan emosional...” (24 Oktober 2025 , 17.00 WIT)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Kampung Habema Distrik Ibele, dapat disimpulkan bahwa sikap positif pemerintah kampung dalam melaksanakan pembangunan sudah tampak melalui cara berkomunikasi yang ramah, membangun semangat gotong royong, serta mendorong partisipasi masyarakat, meskipun masih terdapat kendala dalam membangun komunikasi dua arah yang lebih partisipatif.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pola komunikasi pemerintah kampung yang cenderung satu arah, di mana aparat lebih sering memberikan instruksi dibanding membuka ruang dialog atau diskusi terbuka. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa hanya sebagai pelaksana, bukan bagian dari proses perencanaan atau pengambilan keputusan pembangunan. Untuk itu diharapkan pemerintah kampung perlu meningkatkan komunikasi dua arah dan keterlibatan warga dalam proses perencanaan, agar sikap positif yang sudah ada dapat berkembang menjadi budaya komunikasi partisipatif dan kolaboratif yang berkelanjutan.

5. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan merupakan prinsip penting dalam komunikasi pemerintahan, terutama di masyarakat majemuk seperti Kampung Habema Distrik Ibele. Kesetaraan menuntut agar semua masyarakat tanpa memandang jenis kelamin, usia, status sosial, atau latar budaya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan. Pemerintah kampung harus mampu memastikan bahwa setiap kelompok memiliki akses yang adil terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan.

Kesetaraan dalam komunikasi pemerintahan Kampung Habema Distrik Ibele menunjukkan kemajuan, namun masih terdapat ketimpangan dalam partisipasi dan akses informasi di antara kelompok masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan DM selaku Kepala Kampung Habema Distrik Ibele Kabupaten Jajay mengemukakan bahwa :

“...menurut saya kesetaraan disini sudah bagus dimana biasanya semua warga, tanpa memandang latar belakang, itu diundang untuk menghadiri musyawarah pembangunan kampung. Dimana setiap kepala keluarga memiliki hak bicara yang sama dalam menentukan arah pembangunan kampung...” (21 Oktober 2025 , 10.20 WIT)

Ditambahkan oleh KE selaku Kaur Perencanaan Kampung Habema Distrik Ibele yang mengemukakan bahwa :

“...saya melihatnya untuk kesetaraan disini penetapan penerima manfaat program selalu didasarkan pada tingkat kebutuhan ekonomi, bukan hubungan pribadi, jadi saya rasa itu sudah cukup adil dan setara...” (22 Oktober 2025 , 12.30 WIT)

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh AW selaku Tokoh Perempuan Kampung Habema Distrik Ibele bahwa :

“...saya menilai kesetaraan belum maksimal dimana kita perempuan masih jarang dilibatkan secara aktif dalam forum pengambilan keputusan. Biasanya kita sering hadir

hanya sebagai pendengar, bukan pengambil keputusan...” (23 Oktober 2025 , 10.00 WIT)

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh EM selaku Tokoh Pemuda yang nyatakan bahwa :

“....saya sendiri menilai bahwa suara generasi muda belum mendapat perhatian penuh, meskipun mereka memiliki ide-ide kreatif dalam pembangunan...” (23 Oktober 2025 , 17.00 WIT)

Ditambahkan juga oleh RS selaku Kepala Suku Kampung Habema Distrik Ibele yang mengemukakan bahwa :

“....saya melihat nilai kesetaraan sebenarnya telah lama hidup dalam budaya lokal melalui sistem musyawarah adat yang inklusif. Namun, mekanisme formal di pemerintahan kampung belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip tersebut..” (23 Oktober 2025 , 15.00 WIT)

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan di Kampung Habema Distrik Ibele, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kampung telah berupaya mewujudkan prinsip kesetaraan dalam komunikasi dan pelaksanaan pembangunan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya merata bagi seluruh kelompok masyarakat. Untuk itu diperlukan penguatan peran perempuan, pemuda, dan kelompok marginal agar mereka memiliki ruang yang sama dalam menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses pembangunan. Peningkatan kesetaraan ini akan memperkuat partisipasi masyarakat secara inklusif dan memperkuat legitimasi sosial pemerintahan kampung.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap lima indikator komunikasi pemerintahan menurut DeVito (2013), dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemerintahan Kampung Habema Distrik Ibele secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan penguatan dalam beberapa aspek.

Pertama, dari sisi keterbukaan (openness), pemerintah kampung telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dengan menyampaikan hasil musyawarah dan penggunaan dana pembangunan kepada masyarakat. Namun, keterbukaan ini masih bersifat satu arah dan belum sepenuhnya partisipatif, karena masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Kedua, empati (empathy) pemerintah kampung terlihat melalui upaya mendengarkan kebutuhan warga secara langsung melalui kunjungan lapangan dan forum informal seperti kegiatan adat dan keagamaan. Namun, empati terhadap kelompok perempuan masih perlu diperkuat agar kebijakan pembangunan dapat lebih responsif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga, sikap mendukung (supportiveness) pemerintah tampak dari adanya dorongan dan fasilitasi terhadap inisiatif masyarakat, seperti pelatihan pertanian dan bantuan material pembangunan. Walaupun demikian, dukungan lanjutan dan pembinaan pasca kegiatan masih kurang, sehingga hasil pembangunan belum sepenuhnya berkelanjutan.

Keempat, sikap positif (positiveness) pemerintah kampung tercermin dalam komunikasi yang ramah dan penuh motivasi, serta kegiatan bersama warga yang menumbuhkan rasa kebersamaan. Namun, pola komunikasi yang masih dominan satu arah perlu diperbaiki agar masyarakat merasa lebih dilibatkan dalam proses pembangunan.

Kelima, kesetaraan (equality) dalam komunikasi pemerintahan menunjukkan kemajuan yang cukup baik melalui pelaksanaan musyawarah kampung yang terbuka bagi seluruh warga. Akan tetapi, kesetaraan partisipasi perempuan dan pemuda masih terbatas,

sehingga perlu adanya ruang yang lebih inklusif agar semua kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, komunikasi pemerintahan di Kampung Habema telah membangun dasar yang kuat bagi terciptanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. Namun, untuk mencapai efektivitas komunikasi pemerintahan yang ideal, dibutuhkan penguatan aspek partisipasi, empati, dan kesetaraan agar pembangunan benar-benar berjalan *dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anas, N., & Sapri, S. (2022). Komunikasi Antara Kognitif dan Kemampuan Berbahasa. *EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)*, 1(1), 1–1. <https://doi.org/10.30821/eunoia.v1i1.997>
- Haris, F. Z. A., & Amalia, A. N. (2024). Model Komunikasi Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Al-Balagh Jurnal Komunikasi Islam*, 7(2), 55–55. <https://doi.org/10.37064/ab.jki.v7i2.21458>
- DeVito, J. . (2013). *The Interpersonal Communication Book* (14th ed (ed.)). Pearson Education, Limited.
- Izzanti, D. A., Nasution, M. R., Wasik, H. A., Juanda, M. I., & Nasution, S. (2025). Hakikat Bahasa dalam Objek Kajian Linguistik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia pustaka atau kajian literatur . Kajian Pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis. *Semantik : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*.
- Juanda, A., Kurniawan, P., Suwanto, S., Eka, P. D., & Astutik, E. P. (2020). Menumbuhkan Rasa Gotong Royong Dan Interaksi Sosial Di Kelurahan Pondok Jaya Kota Tangerang Selatan. *Dedikasi PKM*, 1(2), 13–13. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v1i2.6383>
- Mulyani, M., Yunita, K., & Ginting, R. (2024). Household Accounting: Benarkah Mencegah Family Disharmony? *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 8(1), 131–145. <https://doi.org/10.30871/jama.v8i1.7371>
- Mustika, W. W., Djazuli, A., Muchsir, M., Wardani, S., Tanzili, M., Mahfuz, A. L., Hayatuddin, K., Suatmiati, S., Dharma, M., & Welly, E. (2025). *Pelaksanaan Putusan Ptun Nomor 10/G/Tf/2022/Ptun.Plg Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis Di Kota Palembang*.
- Nasfi, N., & Ariani, D. (2020). Komunikasi Persuasif Pemerintah Nagari Sungai Pua Kepada Ninik Mamak Untuk Mencapai Pembangunan Sosial dan Ekonomi. *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 5(1), 122–135. <https://doi.org/10.36665/jusie.v5i01.234>
- Nurnoviyati, I. (2025). Pengaruh Komunikasi Politik Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Masyarakat Desa Pesarean Adiwerna Tegal. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 5028–5035. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.43622>

- Nurrachmah, S. (2024). Analisis Strategi Komunikasi Dalam Membangun Hubungan Interpersonal Yang Efektif. *Jurnal Inovasi Global*, 2(2), 265–275. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i2.60>
- Rante, F., Toding, I. G., & Sartika, N. (2025). Pengaruh Penerapan Coretax dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4052–4064. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4068>
- Safira, R. L., Prasiwi, R. R. I., Julia, A., & Putra, N. R. (2022). Kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan pelabuhan di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang. *Region Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 296–296. <https://doi.org/10.20961/region.v17i2.59327>
- Sartika, R., Suratriadi, P., & Astuti, F. D. (2023). Komunikasi Antar Pribadi Guru Dan Siswa Dalam Memotivasi Belajar Siswa SMP Negeri 13 Bogor. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 4(1), 13–22. <https://doi.org/10.31294/jpr.v4i1.1977>
- Soeltanto, T., Utami, W., Ratu, I. P. T., & Hadiwiyono, H. (2025). Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Akses Journal Of Publikc & Business Administration Science*, 7(1), 62–69. <https://doi.org/10.58535/jasm.v7i1.66>
- Sukmawati, L. (2020). Komunikasi Dan Konseling Bidan Dengan Metode Nlp (Neuro-Linguistic Proramming). *Seminar Nasional Multidisiplin*, 2(1), 198–210. <http://prosiding.respati.ac.id/index.php/PSN/article/download/281/273>
- Suseno, S. (2023). Peran Baru Widyaiswara di Era Pembelajaran Berbasis Digital. *Jurnal Good Governance*, 30–69. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i1.584>
- Syakura, F. P., Tondy, C. J., Putri, A., & Risti, S. F. (2025). *Reforma Agraria: Overview Implementasi dan Hambatannya dalam Mewujudkan Masyarakat Berkeadilan Sosial*.
- Tanjung, J. Y., Dhuha, N. K., & Halking. (2025). Analisis Peran Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Gotong Royong Masyarakat Di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan.*, 5(2), 883–888. <https://doi.org/10.36085/jupank.v5i2.9309>
- Ulfyah, M., Saripah, S. R., & Syarifudin, E. (2023). Komunikasi Formal dan Informal Dalam Jaringan Komunikasi. *Journal on Education*, 6(1), 6619–6628. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3894>
- Zahra, L. (2023). Membangun Masyarakat Inklusi (Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Disabilitas Intelektual). *REPRESENTAMEN*, 9(1), 9–17. <https://doi.org/10.30996/representamen.v9i01.7487>